

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001*, (Bandung, Alfabeta, 2008)
- Andi Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Edisi 1*, (Jakarta, Akademik Pressindo, 1985)
- , *Korupsi Dalam Proyek Pembangunan*, (Jakarta, Akademika Presindo; 1984)
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005)
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa*, (Jakarta,Pustaka Sinar Harapan. 1996)
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Darwin Prinnst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- David N. Hyman. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy* (Mason: South-Western, 2008)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai (Jakarta, Pustaka, 1995)
- Dian Puji N. Simatupang. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. (Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011).
- Djoko Prakoso, Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung, Armico, 1988)

- Donald P. Moynihan *Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries*, Andwar Shah (ed.), from *Participatory Budgeting* (Washington D.C: The World Bank, 2007)
- E. Utrecht dan Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet. 9*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1990)
- Ervianto Wulfram, *Manajemen Proyek Konstruksi*, (Yogyakarta, Andi, 2002)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi ke 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Thafa Media, Yogyakarta, 2014)
- I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. (Jakarta, Erlangga, 2010)
- Irving Swedlow, *The Public Administration of Economic Development* (New York: Praeger Publisher, 1975)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. (Jakarta: PT Gramedia, 2005)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kramer ST A.I.N, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru. Van Hoeve , 1997)
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar. Baru. 1984)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Cet.II*, (Bandung, PT. Alumni, Bandung, 2011)
- Lukman Ali, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka., 1995)

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Made Wena. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009)
- Marwan Effendy, *Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Mubyarto, *Ilmu ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*. (Jakarta, Yayasan Argoekonomika, 1980)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Perss, 2002)
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2006)
- Rusli Effendy *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan. Universitas Muslim Indonesia, 1989)
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia* (Jakarta, Pustaka, 2014)
- Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Press, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, Cetakan 3, 1998)
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung, PT. Alumni, 1985)

Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta, Rineka Cipta. 1990)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007)

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data* (Jakarta, Kontemporer, LP3ES, 1983)

Theodorus. M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Salemba Empat: 2009)

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2003)

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung, 2003)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tentang Pembendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4335, Ps. 1 ayat (22).

Peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010

### **Jurnal**

Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009)

Taufiequrachman Ruki, *KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, (Jakarta, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi:

Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006)

Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005)

